



Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Adat Bindu, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

I Gusti Ayu Dwira Angganita

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Indonesia

*Correspondence author dwiraangganita@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of source-based waste management policy at the Reduce, Reuse, and Recycle (3R) Waste Processing Facility in Bindu Traditional Village, Abiansemal District, Badung Regency. The research employs a qualitative descriptive approach, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Informants were selected through purposive sampling, totaling eight individuals. The findings indicate that the implementation of source-based waste management policy has been effectively carried out, as evidenced by the comprehensive waste processing system, with no residual waste being sent to the final disposal site (TPA), and the creation of a clean environment. However, the aspects of efficiency and responsiveness remain suboptimal. The implementation of this policy has generated positive impacts on the community, particularly in improving environmental cleanliness and public welfare. The study recommends strengthening collaboration with stakeholders to ensure program sustainability, optimize the achievement of policy objectives, and reduce dependency on government assistance.*

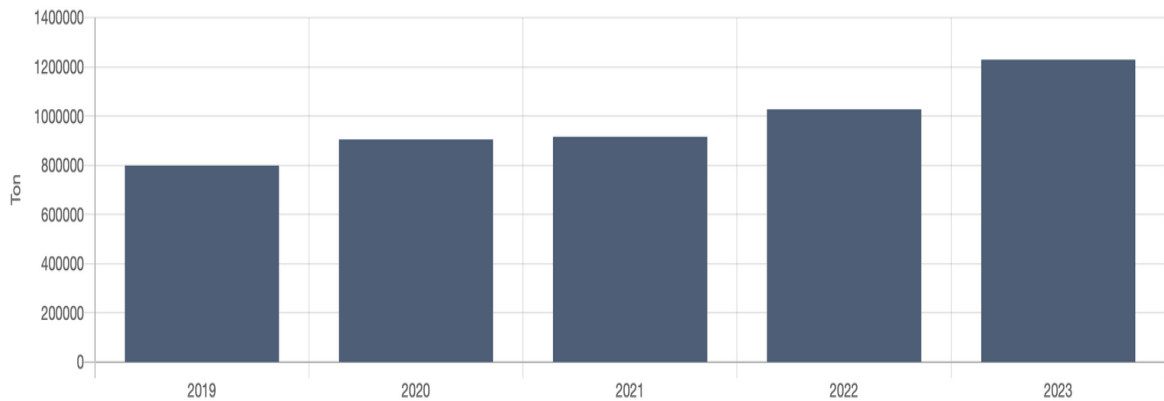
Keyword: *Policy evaluation; implementation; source-based waste management; waste management site; reduce reuse recycle (3R)*

How to Cite:

Angganita, I. G. A. D. (2025). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Adat Bindu, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 87-95. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.1.2025.87-95>

1. Pendahuluan

Industri pariwisata di Bali tidak bisa dilepaskan dengan fenomena persoalan sampah. Meskipun sektor pariwisata menyumbang sekitar tujuh puluh persen (70%) perekonomian Bali, namun ternyata wisatawan sendiri menghasilkan sampah plastik per kapita 3,5 kali lebih banyak dibandingkan penduduk setempat (Stryson, 2023). Kondisi peningkatan timbulan sampah yang terjadi dengan sistem pengelolaan sampah metode penimbunan (landfill) masih menjadi kendala atas keterbatasan lahan serta penolakan warga sekitar. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat volume timbulan sampah di Bali telah mencapai angka 1,22 juta ton pada tahun 2023 (SIPSN, 2024). Jumlah ini meningkat 19,6 persen dibanding tahun 2022 yang menggambarkan urgensi permasalahan sampah di Provinsi Bali. Volume timbulan sampah secara detail dari tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Volume timbulan sampah di Bali Tahun 2019-2023

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada sipsn.menlhk.go.id Mengenai pengelolaan sampah, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) sebagai salah satu kebijakan dalam menangani permasalahan sampah. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa tiap Kabupaten/Kota menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 3R pada wilayah pemukiman guna menanggulangi sampah. TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi timbulan sampah. Salah satu diantaranya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan pendekatan holistik yang menempatkan fokus pada pencegahan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak awal (PUPRKIM, 2024). Kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan budaya bersih dan meningkatkan peran Produsen, Desa Adat, serta Desa/Kelurahan dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang mengembangkan TPS 3R di beberapa lokasi sebagai upaya menggeser sistem pengelolaan sampah yang masih bersifat klasik (*landfill*) menuju pengolahan sampah dengan prinsip 3R. Implementasi pengelolaan sampah dengan konsep 3R menjadi perhatian pemerintah Bali khususnya di Kabupaten Badung yang telah melakukan kajian optimalisasi peran TPS 3R dalam pengelolaan sampah di tahun 2024.

Laporan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung mencatat, saat ini Kabupaten Badung telah memiliki 39 (tiga puluh sembilan) TPS 3R dengan status aktif sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tempat dan 6 (enam) tempat dengan kondisi belum beroperasi. Pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Operasional TPS 3R kepada 21 Pemerintah Desa (Badung A. W., 2023). Salah satu Desa Adat di Kabupaten Badung yang menerima dana BKK tersebut ialah Desa Adat Bindu.

Desa Adat Bindu telah membangun TPS 3R Bhakti Pertiwi secara swadaya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sejak tahun 2020. Permasalahan seperti ditemukannya beberapa kasus pembakaran sampah secara liar (*open burning*), sejumlah warga yang menunggak pembayaran iuran pengelolaan sampah, serta belum optimalnya penggunaan produk hasil pengolahan sampah menjadi alasan penting dalam melakukan kajian evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Adat Bindu. Pada pengelolaan sampah terpadu, partisipasi masyarakat menjadi komponen penting dalam melihat sejauh mana kesadaran

masyarakat mengambil peran dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Peran dari berbagai pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu program, termasuk peran generasi milenial sebagai sosok yang muda, dinamis, penuh energi, dan optimis diharapkan dapat menjadi agen perubahan (Dewi, 2018).

Pengelolaan sampah dengan metode 3R ini merupakan isu actual yang sedang berkembang dan dijadikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menanggulangi persoalan sampah. Oleh karena itu, fenomena ini sangat menarik untuk dilakukan kajian terkait evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di TPS 3R Bhakti Pertiwi Desa Adat Bindu. Evaluasi pengelolaan sampah berbasis sumber juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan. Tujuan penelitian adalah: (1) mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di TPS 3R Desa Adat Bindu, dan (2) mengetahui dampak implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di TPS 3R Desa Adat Bindu.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data utama penelitian berupa data kualitatif yang ditunjang oleh data kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data primer berupa pengamatan langsung (observasi) di lapangan dan wawancara (interview). Data sekunder berasal dari sumber tertulis atau dokumen yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif melalui tahapan pengumpulan, penyajian, kondensasi, dan penarikan Kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak delapan orang. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala pelaksana TPS 3R Bhakti Pertiwi Desa Adat Bindu.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Adat Bindu, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Dunn (2003) mengemukakan bahwa terdapat enam indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan yaitu: 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Perataan, 5) Responsivitas, dan 6) Kesesuaian/Ketepatan. Keenam indikator ini dijadikan acuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan dampaknya di TPS 3R Desa Adat Bindu.

Efektivitas

Tujuan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber yaitu, (1) mengelola sampah hasil rumah tangga secara mandiri, (2) meminimalisir jumlah timbulan sampah, (3) mengurangi beban sampah menuju ke TPA, dan (4) menciptakan lingkungan yang bersih bebas dari permasalahan sampah. Tujuan tersebut direalisasikan dengan berbagai upaya ataupun program. Berawal dari penyusunan pararem atau peraturan adat yang disetujui oleh masyarakat untuk digunakan sebagai dasar acuan dalam implementasi kebijakan di Desa Adat Bindu. Pararem yang telah disetujui dijadikan acuan dasar hukum dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga. Selain pararem, pemerintah Desa Adat Bindu juga melakukan serangkaian pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti; pembangunan gedung TPS 3R, perlengkapan armada fungsional dan mesin-mesin pengolahan sampah yang digunakan untuk memperlancar jalannya program

pengelolaan sampah. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan dana desa adat, dana BKK dari pemerintah kabupaten Badung maupun bantuan revitalisasi dari pihak eksternal.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Adat Bindu dilakukan secara mandiri di bawah otoritas desa adat. Hal tersebut menjadikan TPS 3R Bhakti Pertiwi sebagai satu-satunya tempat pengelolaan sampah berbasis sumber yang beroperasi secara mandiri tanpa kerja sama dengan desa dinas ataupun lurah di Kabupaten Badung hingga saat ini. Meskipun pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Adat Bindu dilakukan secara swadaya, namun TPS 3R memiliki rekanan yang menampung sampah plastik dan pupuk kompos, seperti Bali Eco dan Ubud Asosiasi Garden. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mempermudah jalannya prinsip reduce, re-use, dan re-cycle. Berikut ditampilkan data komposisi sampah yang dikelola di TPS 3R Bhakti Pertiwi Desa Adat Bindu pada tabel 1 dibawah

Tabel 1. Komposisi Sampah di TPS 3R Tahun 2025

No	Judul Informasi	Jumlah
1.	Jumlah sampah masuk perhari	675 kg/hari
2.	Jumlah sampah organik perhari	405 kg /hari
3.	Jumlah sampah anorganik perhari	168,75 kg /hari
4.	Jumlah sampah residu per hari	101,25 kg/hari
5.	Jumlah kompos di produksi	550 kg/bulan
6.	Jumlah sampah anorganik terjual	1.760 kg/bulan

Sumber: TPS 3R Bhakti Pertiwi, 2025

Tabel tersebut menampilkan komposisi sampah yang dikelola oleh TPS 3R Bhakti Pertiwi pada tahun 2025. Jumlah sampah yang masuk perhari di tahun 2020-2021 mencapai 500kg/harinya, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 675kg/hari. Dengan demikian, terjadinya peningkatan jumlah sampah masuk sekitar 175 kg/harinya akibat aktivitas masyarakat yang semakin berkembang, sehingga kapasitas tampungan TPS semakin berkurang.

Efisiensi

Dari hasil studi dokumen dan proses wawancara, dinyatakan bahwa pembangunan TPS 3R di Desa Adat Bindu telah dilakukan pada akhir tahun 2020, tepatnya pada bulan Agustus menggunakan dana desa adat. Pembangunan tersebut mencakup pembangunan gedung seluas 3 are dengan armada fungsional dua motor roda tiga dan satu mesin pencacah. Pembangunan dan pembelian sarana prasarana tersebut menghabiskan anggaran desa adat sebesar Rp 305.500.000,00. Pada tahun 2021, TPS 3R Bhakti Pertiwi mendapat bantuan revitalisasi sarana prasarana dari pemerintah Kabupaten Badung berupa satu unit mesin cacah, satu unit mesin ayak, satu unit mesin press plastik, dan satu unit motor roda tiga. Total sarana prasarana yang dimiliki menjadi tiga motor roda tiga, dua mesin pencacah, satu mesin ayak, dan satu unit mesin press plastik. Bantuan berikutnya diberikan oleh Fakultas Teknik Politeknik Negeri Bali berupa kanopi untuk memperluas area TPS. Pada tahun 2023, TPS 3R Bhakti Pertiwi mendapat bantuan dana operasional Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah kabupaten Badung berjumlah Rp 237.000.000,00 setelah dipotong pajak. Dana tersebut diterima oleh Desa Mekar Bhuwana dan mendapat pengawasan dengan mengirim laporan ke dinas terkait yang dilakukan oleh petugas Desa Mekar Bhuwana. TPS 3R Bhakti Pertiwi telah mendapatkan dukungan pendanaan dan sarana prasarana dari pemerintah

Kabupaten Badung dan pihak eksternal, namun belum pernah menerima pendanaan tambahan dari sektor swasta atau menerima program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam kurun waktu tahun 2020-2025, pengelolaan sampah di Desa Adat Bindu menarik iuran sebesar Rp 15.000,00/KK per bulannya. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program dikarenakan biaya operasional perbulannya mencapai Rp 12.000.000,00 hingga Rp 15.000.000,00-. Kebutuhan biaya operasional tersebut untuk memenuhi kebutuhan pekerja dengan gaji berkisar Rp 2.500.000-Rp 2.700.000 per orangnya dengan total empat orang petugas dan satu kepala pelaksana. Pemasukan perbulan hanya mencapai Rp 4.230.000,00-, dalam kondisi tidak ada tunggakan iuran. Pengeluaran biaya operasional tiap bulannya tidak diikuti dengan pemasukan yang cukup. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu keberlanjutan program apabila tidak menemukan solusi yang menguntungkan.

Kekurangan biaya operasional tiap bulannya tertutupi oleh dana BKK yang telah disisihkan sebesar Rp 95.000.000,00- dari tahun 2024. Pada tahun 2025, Kepala Pelaksana TPS 3R akan mengajukan kenaikan iuran agar tidak bergantung pada dana tersisa dari dana BKK. Selain kendala biaya operasional, penanganan sampah residu dilakukan dengan pembakaran pada tungku sampah setiap harinya. Hal ini ditempuh karena residu sampah yang dihasilkan sebesar 15 persen, sedangkan aturan pemerintah sebesar 3 persen. Kurang memadainya mutu SDM dan alat pengelolaan yang ada menjadi salah satu kendala dari TPS 3R.

Kecukupan

Kecukupan sangat erat kaitannya dengan kepuasan sasaran kebijakan. Kebijakan ini telah memenuhi tujuan mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPA dan menciptakan kebersihan lingkungan. Partisipasi serta edukasi masyarakat yang meningkat mengenai pengelolaan sampah adalah keberhasilan lain yang tidak bisa dikuantifikasi. Kebanggaan masyarakat Desa Adat Bindu sebagai akibat lebih dikenalnya Desa Adat Bindu atas pengelolaan sampah kawasan yang dilakukannya, juga peningkatan mutu SDM sebagai akibat implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi keberhasilan yang tidak bisa dinilai dengan angka.

Masyarakat pada sektor pertanian mulai secara perlahan beralih menggunakan pupuk kompos yang dihasilkan TPS 3R Bhakti Pertiwi. Selain itu, minat pemuda dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Adat Bindu juga terus meningkat melalui tumbuhnya motivasi pada kelompok pemuda atau STT untuk bisa menanggulangi sampah di desa dengan mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah, ataupun mengelola sampah plastik yang didaur ulang menjadi produk bernilai guna yang digunakan kembali dalam acara-acara kepemudaan.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik memiliki arti berkenaan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Winarno, 2002). Pengelolaan sampah berbasis sumber di TPS 3R Bhakti Pertiwi melibatkan seluruh partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah maupun pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Partisipasi secara menyeluruh ini berdampak pada menyeluruhnya manfaat yang diterima oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti; STT, PKK, Pokdarwis, dan pemilik homestay/villa merasakan manfaat baik dari segi kebersihan lingkungan dan tidak ada lagi bau yang dihasilkan dari sampah seperti saat sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Kendati demikian, sebaran manfaat belum merata pada pihak seperti Hotel Furama dan Fasilitas Kesehatan

RS Windu Husadha yang tidak bisa dilayani karena jenis sampah yang lebih kompleks dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana di TPS 3R Bhakti Pertiwi dalam penanganan sampah tersebut.

Responsivitas

Responsivitas adalah modal terbesar yang dimiliki oleh Desa Adat untuk mendukung keberhasilan dari kebijakan yang ditetapkan. Masyarakat menyambut baik kebijakan ini dibuktikan dari hasil wawancara dimana masyarakat terlibat dalam proses pembentukan pararem, pemilahan sampah, hingga sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam proses pembangunan sarana dan prasarana di TPS, masyarakat terlibat langsung baik sebagai petugas TPS maupun tim pelaksana kegiatan. Hal ini telah mencerminkan sinergi antara pemerintah desa adat dengan masyarakat dalam mendukung upaya pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun, adanya masyarakat yang menunggak iuran sebanyak 22% tiap bulannya menunjukkan responsivitas yang belum maksimal dari masyarakat yang dipahami karena perbedaan situasi ekonomi. Kendala iuran ini memerlukan pemecahan masalah yang menguntungkan semua pihak.

Ketepatan

Masyarakat Desa Adat Bindu sebagian besar bekerja dalam bidang pariwisata, pertanian, dan sektor formal. Permasalahan yang sering terjadi akibat pariwisata ialah tumpukan sampah yang tidak dikelola sehingga dapat mengganggu kualitas lingkungan hingga kualitas hidup masyarakat, terlebih saat musim hujan. Melalui pengelolaan sampah berbasis sumber, sampah rumah tangga dan pariwisata yang dihasilkan terkelola dengan baik hingga bau yang awalnya mengganggu dapat diminimalisir atau bahkan tidak menyisakan bau. Kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber adalah alternatif yang bisa ditempuh melihat potensi pariwisata dan potensi alam yang dimiliki Desa Adat Bindu. Selanjutnya, pergeseran trend minat wisatawan dalam berwisata yang belakangan ini lebih cenderung kembali ke wisata alam yang masih alami menjadi hal penting untuk dipertahankan. Sinyal baik dan ketepatan dari kebijakan ini telah mulai dirasakan oleh masyarakat Desa Adat Bindu. Peluang-peluang kerja sama dengan stakeholder harus lebih dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh pengelola desa adat bindu. Terlebih dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini adalah modal besar yang bisa dimanfaatkan.

Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di TPS 3R Bhakti Pertiwi Desa Adat Bindu

Efektivitas

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di TPS 3R telah menunjukkan efektivitas dalam menangani sampah skala kawasan. Peningkatan volume sampah yang dikelola dari tahun 2020 hingga saat ini tahun 2025, dikarenakan masyarakat sudah berkembang dalam penggunaan layanan order online. Disamping itu, masih terdapat kendala dalam mengurangi presentase sampah residu agar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengelola TPS 3R menggunakan metode pembakaran sampah residu yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada limbah yang harus dibuang ke luar desa. Meski metode pembakaran dapat membantu mengurangi volume sampah, strategi yang lebih ramah lingkungan perlu dikembangkan. Dengan demikian, langkah-langkah strategis dan inovatif perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di Desa Adat Bindu.

Efisiensi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di TPS 3R Bhakti Pertiwi tidak hanya efektif dalam pelaksanaannya, tetapi juga menunjukkan efisiensi dalam menciptakan lingkungan bersih serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Terkait alur dan mekanisme pengelolaan sampah, TPS 3R belum mampu untuk melaksanakan prinsip recycle (daur ulang sampah plastik) secara mandiri. Tantangan dalam mendaur ulang sampah plastik berada pada kurangnya sarana prasarana dan kualitas SDM di TPS 3R Desa Adat Bindu. Meskipun masih terdapat tantangan dalam mengatasi residu sampah, pendekatan dan upaya yang dilakukan telah memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Kecukupan

Pengelolaan sampah berbasis sumber di TPS 3R Desa Adat Bindu telah mencapai aspek kecukupan, terutama dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Meski tidak semua jenis sampah mampu dikelola oleh TPS dikarenakan keterbatasan ilmu dan sarana prasarana. Dengan demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek teknik dan kebijakan, terutama dalam menangani sampah anorganik yang belum memiliki solusi pengelolaan yang optimal.

Perataan

Dalam konteks ini, kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga desa, baik individu maupun kelompok usaha, memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan sampah serta mendapatkan manfaat yang setara dari sistem yang diterapkan. Meskipun sebagian besar masyarakat telah mendapatkan manfaat dari kebijakan ini, ada beberapa sektor yang masih belum terjangkau secara optimal, seperti hotel dan fasilitas kesehatan. Sampah yang dihasilkan dari sektor tersebut belum sepenuhnya dapat dikelola karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Dengan demikian, kebijakan ini tetap memberikan dampak positif dibandingkan dengan kondisi sebelum kebijakan diimplementasikan, dimana tidak ada sistem pengelolaan sampah yang terstruktur di Desa Adat Bindu.

Responsivitas

Indikator responsivitas dapat dilihat melalui kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kebijakan dan dampak yang ditimbulkan bagi sasaran kebijakan. Salah satu cara untuk mengukur responsivitas masyarakat adalah melalui pembayaran iuran. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran dapat menjadi salah satu indikator seberapa besar kesadaran dan dukungan mereka terhadap sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Meski terdapat beberapa warga yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, hal ini dipahami sebagai akibat dari perbedaan kondisi ekonomi di masyarakat. Respon positif juga datang dari pihak eksternal, seperti Ubud Asosiasi Garden yang menampung pupuk kompos hasil olahan TPS 3R serta Eco Bali yang mengambil sampah plastik yang telah dikumpulkan untuk di daur ulang kembali. Keterlibatan pihak eksternal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga bermanfaat bagi pihak eksternal.

Ketepatan

Pengawasan terhadap implementasi kebijakan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) serta pengiriman laporan kepada dinas terkait oleh Pemerintah Desa Mekar Bhuwana. Mekanisme tersebut memastikan kebijakan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan

awalnya dan dapat terus disesuaikan berdasarkan perkembangan serta kendala yang dihadapi. Dukungan pemerintah dalam bentuk pengembangan fasilitas serta adanya mekanisme pengawasan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah disusun dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Namun, sering kali bantuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Seperti; bantuan mesin press plastik yang membutuhkan daya listrik cukup tinggi, proses yang lebih rumit dan memakan waktu lama memiliki perbandingan harga jual yang sangat tipis dibandingkan dijual langsung ke pengepul tanpa melalui proses pengolahan (press) terlebih dahulu.

4. Simpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber berdasarkan Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2019 di TPS 3R Desa Adat Bindu, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik karena mampu mengurangi beban sampah yang diangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah yang dilakukan secara tuntas dan menciptakan kebersihan lingkungan. Namun, efisiensi dan responsivitas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber belum optimal karena adanya peningkatan jumlah timbulan sampah mencapai 175kg/harinya dibandingkan tahun awal kebijakan diimplementasikan dan terdapat 22 persen masyarakat yang menunggak iuran pengelolaan sampah. Terdapat kendala dalam penanganan sampah residu yang masih dibakar dan tantangan biaya operasional tinggi.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di TPS 3R Desa Adat Bindu memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam bidang kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kebersihan lingkungan dilihat dari tidak adanya sampah yang dikirim ke TPA. Kesejahteraan masyarakat dilihat dari adanya manfaat ekonomi yang diterima pegawai TPS dan pihak ketiga, serta telah menunjukkan dampak pada meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Daftar Pustaka

- Badung, A. W. (2023). *Bupati Giri Prasta Gelontorkan 9 Miliar Dana BKK TPS3R Tahun 2023, Dorong Desa Optimalkan Potensi dan Raih Prestasi*. [Online] Available at: <https://badungkab.go.id/kab/berita/48281-bupati-giri-prasta-gelontorkan-9-miliar-dana-bkk-tps3r-tahun-2023-dorong-desa-optimalkan-potensi-dan-raih-prestasi>
- Badung, B. R. d. I. D. K. (2024). *Kajian Optimalisasi Peran TPS 3R dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung*, Badung: BRIDA.
- Dewi, I. G. A. A. Y. (2018). Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 84-92
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3rd Ed. USA: Sage Publications
- Puprkim, T. 2024. *Mengembangkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber: Langkah Menuju Bali yang Bersih dan Berkelanjutan*. [Online] Available at: <https://tarubali.baliprov.go.id/mengembangkan-pengelolaan-sampah-berbasis-sumber-langkah-menuju-bali-yang-bersih-dan-berkelanjutan/#:~:text=Pengelolaan%20sampah%20berbasis%20sumber%20merupakan,tentang%20pentingnya%20meminimalkan%20produksi%20sampah.>
- SIPSN. (2024). *Timbulan Sampah*. [Online] Available at: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> [Accessed 5 November 2024]

Stryson, E. (2023). *Unlocking Bali's Plastic Tourist Trap*. [Online] Available at: <https://asianews.network/unlocking-balis-plastic-tourist-trap/>

Utama, I. P. W. (2023). Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali: Problematika dan Solusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 175-182.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, B. (2009). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt Buku Kita

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS